

Bulan :

1	2	(3)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	(3)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos Sindo	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Republika	Kompas		

Halaman 14

1.705 Aset Pemkab Belum Bersertifikat

SLAWI - Sebanyak 1.705 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal masih belum bersertifikat. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan pemkab.

Wakil Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan, berdasarkan hasil inventarisasi atau pengumpulan data-bidang tanah, masih banyak aset tanah milik pemkab atau dalam penguasaan pemkab yang belum bersertifikat.

"Dari proses inventarisasi tersebut, ditemukan 630 bidang tanah milik pemda sudah bersertifikat, sementara 1.705 bidang tanah belum bersertifikat," kata Umi kemarin.

Menurut Umi, banyaknya aset tanah yang belum bersertifi-

fikat tersebut bisa menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Dia mencontohkan gagalnya rencana pembangunan subterminal di Yomani karena tanah yang digunakan dan sudah dibeli pemkab belum bersertifikat. "Padahal, sudah dialokasikan anggaran pembangunananya," kata Umi.

Kendala serupa juga dialami ketika direncanakan pembangunan gedung sekolah dan sarana publik lainnya sehingga masyarakat yang dirugikan. Ke-

tiadaan bukti kepemilikan tanah oleh pemda menjadi prasyarat utama untuk mengakses dana bantuan pemerintah pusat ataupun provinsi.

"Bukti kepemilikan tanah oleh pemda menjadi prasyarat utama untuk mengakses dana bantuan pemerintah pusat ataupun provinsi," ucapnya.

Umi mengungkapkan, untuk mengatasi permasalahan banyaknya aset tanah yang belum bersertifikat tersebut, sudah dialokasikan anggaran Rp450 juta. Diharapkan selu-

ruh bidang tanah yang belum bersertifikat sudah tuntas disertifikasi pada tahun ini. "Tahun ini kami menganggarkan Rp450 juta untuk proses penelusuran dan penyertifikatan aset-aset tanah milik pemkab," tandasnya.

Umi menambahkan, upaya menuntaskan penyertifikatan aset tersebut juga karena pemkab dihadapkan pada target pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pe-

meriksa Keuangan (BPK).

Salah satukendala utamaberkelirupercapainya predikat tersebut karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah bidang tanah yang terdata dalam kartu inventarisasi barang (KIB) dengan bukti kepemilikan sertifikatnya. "Saya mengarahkan penataan aset ini menjadi program prioritas utama reformasi birokrasi," tandas Umi.

Umi juga meminta kerjasama semua pihak terkait agar membantu proses penyertifikasian tanah-tanah tersebut,

termasuk penyamaan persepsi terkait asal usul tanah. "Saya minta pemerintah desa legowo jika pada tanah yang masih terdata dalam kartu inventaris desa, tapi di atasnya berdiri bangunan publik yang dibangun oleh negara melalui pemerintah untuk disertifikasi," ujarnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal Herry Sudihartono menyatakan, pihaknya siap membantu pemkab dalam menyertifikasi aset-aset tanah milik pemkab.

• farid firdaus